

A. LATAR BELAKANG

Konstitusi mengamanatkan negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas kebencanaan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di tanah air didasarkan oleh semangat mengimplementasikan amanat ini untuk melindungi rakyat yang hidup di wilayah yang memiliki kondisi geografis dan geologis rawan terjadi bencana yang menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berada di Cincin Api Pasifik (*ring of fire*), di atas lempengan tektonik yang tidak stabil membuat Indonesia sering mengalami bencana letusan gunung api, gempa dan tsunami. Cincin Api Pasifik adalah daerah yang memiliki banyak sesar atau zona rekahan yang memanjang sekitar 40 ribu kilometer mulai dari Chili, Jepang, dan kemudian berhenti di Asia Tenggara. Sekitar 90 persen semua gempa bumi di dunia dan 80 persen gempa bumi terbesar di dunia terjadi di sepanjang daerah Cincin Api Pasifik ini. Dilansir oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sekitar 5000 kali gempa besar dan kecil terjadi di Indonesia setiap tahunnya.

Meskipun kondisi geografis di cincin api ini memberikan tanah yang subur untuk ditanami, sumber daya alam yang melimpah di bawah tanah dan pemandangan alam yang indah untuk pariwisata, namun bencana alam yang ditimbulkan menyebabkan kerugian rata-rata 22 triliun rupiah setiap tahunnya. Bahkan gempa dan tsunami di Palu dan Donggala baru-baru ini juga memunculkan bencana baru, *likuefaksi*, dimana tanah bergerak dan bergulung ke bawah yang tentu saja menimbun dan membenamkan apa saja yang tadinya berada di atas permukaan. Dampak dari kejadian likuefaksi ini tentu saja tidak sederhana dan perlu penanganan yang sama sekali baru dan berbeda.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendorong tata kelola penanggulangan bencana di Indonesia untuk tidak hanya fokus pada upaya penanganan respon darurat semata, melainkan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan risiko bencana secara komprehensif. Selain itu, sesuai dengan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana juga diharapkan dapat

mendorong penguatan kapasitas pemerintah daerah selaku ujung tombak penanggulangan bencana di Indonesia. Dengan memahami bahwa bencana adalah urusan semua orang, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga diharapkan dapat memfasilitasi keterlibatan masyarakat sipil dan dunia usaha, selain pemerintah selaku pemangku kewajiban, untuk terlibat dalam pengurangan risiko bencana di Indonesia.

Saat ini tantangan-tantangan dalam penanggulangan bencana sesungguhnya juga telah mengalami perkembangan dibandingkan dengan kondisi 11 (sebelas) tahun yang lalu. Pada tingkat nasional, pencantuman pengelolaan bencana dalam nawacita ketujuh yang lebih bernuansa ekonomi, menunjukkan keinginan pemerintahan untuk mendorong penanggulangan bencana sebagai investasi ekonomi untuk menyelamatkan atau mengamankan hasil-hasil pembangunan. Titik berat perhatian presiden juga ditunjukkan dengan menyebut masalah asuransi kebencanaan sebagai salah satu solusi untuk mengurangi risiko ekonomi. Hal ini tentu saja berbeda dengan cara-pandang konvensional yang melihat penanggulangan bencana sebagai aktivitas penyelamatan nyawa (*life-saving activities*).

Tantangan lain yang juga tidak kalah pelik adalah bagaimana melakukan harmonisasi dengan undang-undang lain, seperti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) secara implisit menekankan penanggulangan bencana adalah bagian dari urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib pemerintah daerah. Dengan demikian, penanggulangan bencana secara resmi telah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Selama kurang lebih satu dekade pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana beserta peraturan perundangan turunannya, disadari bersama bahwa permasalahan-permasalahan yang diharapkan dapat diperbaiki dengan lahirnya undang-undang tersebut ternyata masih terus berlanjut. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah masih adanya kelemahan koordinasi dan komunikasi, penanganan yang masih bersifat sektoral dan terfragmentasi, serta pandangan para pelaku penanggulangan bencana yang masih berorientasi pada pemberian bantuan fisik.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas maka perlu dilakukan penyempurnaan dengan melakukan penggantian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana agar lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Sehingga perlu dilakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana diperlukan pendalaman untuk menemukan solusi yang tepat dan akurat demi memperbaiki sistem penanggulangan bencana. Salah satunya dengan melakukan kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan Diplomasi Parlemen ke negara yang memiliki karakteristik kebencanaan yang serupa dengan Indonesia dan memiliki sistem penanggulangan bencana yang terpadu. Adapun negara yang sesuai dengan kriteria tersebut adalah negara Chili.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diplomasi Parlemen Badan Legislasi DPR RI selain untuk memperluas wawasan dan pengetahuan serta sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang penanggulangan Bencana, juga untuk mengumpulkan informasi atau data dan pembelajaran penting dari negara Chili terkait pengaturan dan penerapan system penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Tujuan diplomasi Parlemen Badan Legislasi DPR RI adalah untuk mempelajari atau melakukan perbandingan mengenai kebijakan negara yang dikunjungi terhadap:

1. sistem penanggulangan bencana; dan
2. sistem rehabilitasi bencana.

C. AGENDA KEGIATAN

Diplomasi Parlemen ini dilaksanakan pada tanggal 26 Januari – 1 Februari 2019. Delegasi Diplomasi Parlemen melakukan pertemuan dengan Kedutaan Besar Indonesia di Chili, La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI), Centro de Investigacion para la Gestion Integrada del Riesgo de Desastres Naturales/CIGIDEN (National Research

Center for Integrates Disaster Risk Management), Junta National de Bomberos de Chile/BOMBEROS, dan BOMBEROS de Santiago.

D. SUSUNAN ANGGOTA DELEGASI

Susunan Anggota Delegasi Diplomasi Parlemen Badan Legislasi DPR RI ke Chili adalah sebagai berikut:

NO.	N A M A	FRAKSI	KETERANGAN
1	DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH	P. GERINDRA/ A. 388	KETUA BALEG/ KETUA DELEGASI
2	ARIF WIBOWO	PDIP/A. 193	WAKIL KETUA BALEG/ ANGGOTA
3	M. SARMUJI, SE, M.Si	PG/A. 287	WAKIL KETUA BALEG/ ANGGOTA
4	H. TOTOK DARYANTO, SE	PAN/A. 489	WAKIL KETUA BALEG/ ANGGOTA
5	DRS. SUDIRO ASNO, AK	P. HANURA/ A. 553	WAKIL KETUA BALEG/ ANGGOTA
6	HENKY KURNIADI	PDIP/A. 190	ANGGOTA
7	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	PG/A. 298	ANGGOTA
8	WIHADI WIYANTO, SH	P. GERINDRA/ A. 372	ANGGOTA
9	Dr. Ir. BAHRUM DAIDO, M.Si	PD/A. 452	ANGGOTA
10	YANDRI SUSANTO, S.Pt	PAN/A. 494	ANGGOTA
11	DRS. H. IBNU MULTAZAM	PKB/A. 71	ANGGOTA
12	DR. HERMANTO, SE, MM	PKS/A. 88	ANGGOTA
13	MICHIKO DEWI, SH	SEKRETARIAT	
14	NANIK SULISTYAWATI, S.AP		

E. SEKILAS MENGENAI CHILI

Chili terletak di sebelah Barat Daya Benua Amerika Selatan diantara pegunungan Andes dan Samudra Pasifik. Bagian Utara berbatasan dengan Peru, bagian Timur berbatasan dengan Argentina dan Bolivia, bagian Barat berbatasan dengan Samudra Pasifik sedangkan bagian Selatan dengan Kutub Selatan. Chili merupakan salah satu negara terpanjang di dunia yang memiliki garis pantai 4.300 km dengan lebar 180 km membujur dari Utara ke Selatan. Chili juga mengklaim sebagian daerah Antartika seluas kurang lebih 2.006.626 km sebagai wilayahnya. Ibukota Chili, Santiago berada di tengah wilayah yang dikelilingi oleh pegunungan Andes berada 543 meter di atas permukaan laut dan terletak 100 km dari pantai. Chili dibagi dalam 15 region.

Republik Chili adalah sebuah negara kesatuan demokratis dengan sistem presidensial, terdiri dari berbagai institusi yang otonom seperti yang dikehendaki konstitusi dengan fungsi-fungsi tertentu dan dengan kompetensi yang terdistribusi baik di antara organ-organ negara, yang tidak sama dengan doktrin tradisional pemisahana kekuasaan.

Pertumbuhan perekonomian Chili cukup stabil dan positif serta terus mendorong persaingan yang sehat dalam meningkatkan kemajuan dan cukup transparan dalam menerapkan sistem peraturan administrasi publik. Chili mempunyai profil yang cukup baik di dunia, hal tersebut dapat dibuktikan dengan laporan-laporan yang dimuat berbagai institusi internasional. Posisi Chili selalu berada diperingkat yang jauh lebih tinggi dibanding dengan negara-negara tetangganya, yaitu: posisi Doing Business oleh Bank Dunia (peringkat ke-32 dari 185 negara, tahun 2012), Global Investment Trends Monitor oleh UNCTAD (negara di Amerika Latin yang paling banyak menerima dana investasi asing), Indeks Inovasi Global/GII 2012 (peringkat ke-39 dari 50 negara), Indeks Global Food Security (peringkat ke-26 dari 107 negara), Pembangunan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi oleh UTI (peringkat ke-51 dunia atau kedua di Amerika Latin), Negara Maju Berkembang yang mempunyai resiko terendah dari pengaruh dan ancaman perekonomian dunia

oleh Bloomberg (peringkat ke-7 dari 27 negara), Negara Produsen Minuman Anggur Terbesar Dunia oleh OIV (peringkat ke-7), Indeks Kompetitas oleh IMD (peringkat ke-31), Negara yang mempunyai harga bahan bakar minyak termahal dibanding negara-negara maju atau industri oleh IEA, Global Retail Development Indeks 2014 (peringkat tertinggi dalam pengembangan sektor retail di wilayah Amerika Selatan).

Selama menjadi anggota OECD sejak tahun 2010, Chili mendapat penilaian-penilaian, sebagai berikut:

- Peringkat ke-5 sebagai negara yang menerima investasi asing tertinggi;
- Peringkat ke-31 sebagai negara yang mempunyai pertumbuhan taraf hidup tertinggi;
- Peringkat ke-2 sebagai negara yang mempunyai biaya atau tarif pesawat selular termahal;
- Negara yang paling banyak memberikan kredit perbankan bagi pengusaha kecil dan menengah;
- Negara yang mengalami kenaikan tingkat inflasi dalam beberapa tahun terakhir; dan
- Negara yang mempunyai perbedaan pendapatan yang cukup tinggi antara penduduk kaya dan miskin.

F. HASIL KEGIATAN

1. Pertemuan dengan Kedutaan Besar Indonesia di Chili, Santiago

Delegasi Diplomasi Parlemen Badan Legislasi DPR RI diterima oleh Duta Besar RI Philemon Arobaya. Pada acara ramah tamah tersebut Duta Besar sangat mengapresiasi tujuan diplomasi parlemen, karena Chili merupakan negara yang memiliki karakteristik wilayah yang hamper mirip dengan Indonesia dan merupakan negara yang cukup sering dilanda bencana. Chili sudah memiliki sistem penanggulangan bencana yang cukup baik.

Sebagai tambahan Bomberos atau pemadam kebakaran yang akan dikunjungi oleh delegasi bukan milik pemerintah seperti di Indonesia, melainkan milik pribadi dan sudah berdiri sejak 150 tahun yang lalu. Tim mitigasi bencana di Chili juga sudah berjalan dengan baik, ditunjang oleh sarana dan prasarana yang baik pula. Di Chili sering sekali terjadi gempa,

dan bangunan di Chili sudah dirancang untuk tahan terhadap gempa yang berkekuatan hingga 10SR, hal ini menyebabkan apabila terjadi gempa, masyarakat tidak akan berhamburan keluar dan akan tetap beraktivitas seperti biasa karena yakin akan keamanan Gedung tempat mereka berada.

Chili merupakan negara yang terbentang memanjang dari utara ke selatan dan memiliki cuaca yang sangat variatif di setiap wilayahnya. Misalnya, di daerah gurun pasir Atacama, terakhir hujan adalah di tahun 1570, pernah gerimis tipis di tahun 1972. Ini menyebabkan daerah tersebut menjadi sangat tandus dan gersang. Tanah di gurun Atacama merupakan tanah garam. Chili juga memiliki bentangan pegunungan Andes yang puncaknya diselimuti salju. Selain itu di wilayah pantai juga selain ada yang bagian yang panas, juga ada bagian yang dingin karena wilayahnya dekat dengan kutub selatan.

Dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan Pemilu di Indonesia, WNI yang menetap di Chili juga akan menyumbangkan suaranya. Yang terdaftar sebagai pemilih ada 142 orang (87 orang pemilihan langsung dan 55 orang melalui pos). pemilu di luar negeri akan dilakukan 1 minggu lebih awal untuk mengantisipasi lamanya pengiriman surat suara kembali ke Indonesia.

2. Pertemuan dengan La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI)

- ONEMI membuat platform nasional yang digunakan dalam menghadapi keadaan bencana. Saat ini Pemerintah dan Lembaga terkait sedang dalam proses memperbarui kebijakan yang ada dan membuat rencana strategis.
- Pembentukan ONEMI berdasarkan Undang-Undang No. 369 Maret Tahun 1974, dibawah Kemnterian Dalam Negeri. Fungsi dan Kewenangan ONEMI dibuat berdasarkan Keputusan No. 509 November Tahun 1983. Sedangkan Kapasitas koordinasi yang dimiliki oleh ONEMI berdasarkan *the National Civil Protection Plan (NCP)* dalam Keputusan Presiden No. 156 tentang Dalam Negeri.
- NCP adalah dasar rencana keselamatan dan keamanan dasar yang didukung dengan pendekatan manajemen risiko serta pengembangan

yang berkelanjutan serta berisi rencana praktik yang nyata, kebijakan perencanaan, desain prosedur perencanaan pencegahan dan mitigasi.

- Struktur ONEMI berada dibawah Kementerian Dalam Negeri.



- ONEMI melakukan pengawasan dan koordinasi dengan Lembaga dan organisasi teknis lainnya, memberikan peringatan awal (Early Warning) dan sistemnya, melakukan koordinasi antara lain NCPP, serta menciptakan ketahanan dan mengurangi kerentanan terhadap bencana.
- NCPP memvalidasi penggunaan konvensi sinyal internasional, yaitu digunakannya 3 (tiga) warna sinyal lalu lintas (merah, kuning, dan hijau). Sistem siap siaga nasional hanya diaktifkan apabila ada potensi bencana atau bencana telah terkonfirmasi. ONEMI dalam melakukan pemantauan melakukan koordinasi dengan:
 - The National Seismological Center (CSN);
 - The Hydrographic and Oceanographic Services (SHOA);
 - SERNAGEOMIN (National Geological and Mining Service);
 - The National Forest Corporation (CONAF);
 - Directorate General of Water/Department of Health (DGA/DOH); dan
 - The Chilean Meteorological Office (DMC).
- Terdapat 1 ONEMI di tingkat Nasional dan 15 di tingkat daerah.
- Salah satu fungsi terpenting ONEMI adalah mengembangkan Early Warning System (EWS) atau Sistema de Alerta Emergencias yang memberi peringatan pada saat ada keadaan bahaya atau bencana dengan bekerjasama dengan CIGIDEN.

- ONEMI kadang mengambil tindakan preventif, misalnya pada daerah yang memiliki kemungkinan tinggi untuk terjadinya tanah longsor, pada saat curah hujan diperkirakan atau sudah tinggi maka ONEMI memberikan peringatan bagi warga penduduk di daerah tersebut untuk mengungsi sebelum bencana tanah longsor tersebut terjadi.
- ONEMI yang berada di daerah sangat bergantung pada ONEMI Nasional, karena semua keputusan diambil di tingkat Nasional.
- Oleh karena itu koordinasi dan komunikasi antara ONEMI Nasional dan daerah perlu dijaga dengan baik, juga dengan semua yang terkait dengan penanggulangan bencana. Namun hal ini juga menyebabkan sulitnya untuk mengambil keputusan seketika karena terkukung prosedur.
- *Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada* (SHOA) merupakan organisasi yang mengawasi tentang tsunami, *Corporación Nacional Forestal* (CONAF) yang mengawasi kebakaran hutan dan berada dibawah Kementerian Pertanian, dan lain-lain.
- Undang-Undang Nomor 16.282 tahun 1965 tentang Gempa Bumi memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengatur dan mengatasi keadaan darurat yang disebabkan oleh gempa bumi serta kewenangan untuk menggunakan angkatan bersenjata dalam menangani bencana tersebut. Perencanaan terkait penanganan keadaan darurat karena gempa bumi tersebut dibuat oleh Kementerian Pertahanan dan Dalam Negeri.
- 2% (dua persen) dari APBN digunakan untuk dana penanggulangan bencana.
- Di peraturan lama, ONEMI hanya sampai regional, namun untuk mempermudah koordinasi maka ONEMI dirancang untuk berada sampai di tingkat kotamadya.
- Sekarang sedang dibuat *guideline* terkait penerimaan bantuan luar negeri dalam hal penanggulangan bencana. Selama ini digunakan perjanjian yang disepakati dan ditandatangani pemerintah Chile dengan negara-negara yang membantu.

3. Pertemuan dengan Centro de Investigacion para la Gestion Integrada del Riesgo de Desastres Naturales/CIGIDEN (National Research Center for Integrated Disaster Risk Management)

- Rodrigo Cienfuegos adalah Direktur CIGIDEN yang menerima delegasi Badan Legislasi.
- CIGIDEN diberikan alokasi dana USD 2juta/tahun oleh Pemerintah.
- Cigiden merupakan Lembaga non-profit yang sebagian operasionalnya dibiayai oleh pemerintah.
- Merupakan konsorsium 4 kampus di Chile, yaitu:
 - Pontificia Universidad Católica de Chile;
 - Universidad Nacional Andrés Bello;
 - Universidad Técnica Federico Santa María; dan
 - Universidad Católica del Norte.
- CIGIDEN melakukan penelitian mengenai strategi mitigasi yang efisien.
- Untuk Early Warning System (EWS) dikontrol oleh Angkatan Laut dengan bantuan CIGIDEN khususnya untuk penelitian dan pengembangan.
- ONEMI dalam hal ini merupakan koordinator dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu kerjasama dengan ONEMI perlu ditingkatkan dan dibuat lebih jelas pengaturannya agar tidak terjadi miskomunikasi.
- EWS yang ada terus diperbarui agar akibat bencana dapat diminimalisir.

4. Pertemuan dengan Junta Nacional de Bomberos de Chile/BOMBEROS

- Alejandro yang menerima delegasi mewakili Presiden Nasional Junta Bomberos.
- Chili merupakan negara dengan pesisir yang sangat Panjang, kurang lebih 4000km, dengan lebar rata-rata 120m.
- Bomberos di Chili didirikan pertama kali pada tahun 1851 di Valparaiso.
- Di Chili ada 313 markas Bomberos dan tiap departemen memiliki markasnya masing-masing.
- Ada 51.120 sukarelawan, 5.535 orang diantaranya adalah perempuan. Bomberos sendiri memiliki kurang lebih 3.000 armada kendaraan.

- Terkait kebakaran hutan, ada yang khusus menangani hal tersebut yakni *Corporación Nacional Forestal (CONAF)* yang mengawasi kebakaran hutan dan berada dibawah Kementerian Pertanian.
- Untuk sukarelawan, Bahasa bukan merupakan faktor utama. Yang utama adalah standar pelatihan yang digunakan. Oleh karena itu Chili menggunakan standar akreditasi pelatihan Amerika Serikat yang diakui internasional dan sesuai dengan standar yang ditetapkan UN-INSARAG.
- Yang diajarkan antara lain adalah teknik mencari orang, teknik penyelamatan, teknik merusak bangunan, teknik agar bangunan tidak semakin runtuh, dan lain-lain.
- Bomberos memiliki 8 sub-spesialisasi yang dibagi berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh sukarelawan.
- Untuk menjadi anggota Bomberos biasanya seseorang yang:
 - Memiliki keinginan untuk menjadi sukarelawan;
 - memiliki panggilan hati nurani;
 - mengutamakan kepentingan orang lain sebelum diri sendiri;
 - professional karena mengikuti akreditasi;
 - memiliki pemahaman atas hirarki yang ada di Bomberos;
 - disiplin; dan
 - demokratis.
- Ada 2 tahapan, yakni akreditasi yang dilakukan secara nasional dan sertifikasi yang dilakukan secara internasional.
- Dana dari Pemerintah kurang lebih USD 65juta/tahun. Selain itu Pemda memberikan dana kurang lebih USD 10-15juta/tahun.
- Di negara seperti Italy dan Amerika Serikat misalnya kota New York, dana yang dianggarkan Pemerintah adalah kurang lebih USD 50/orang/bulan, saat ini di Chili hanya USD 6/orang/bulan.
- Ada hak istimewa yang diberikan khusus untuk sukarelawan Bomberos apabila sedang menjadi sukarelawan maka ia tidak dapat dipecat dari pekerjaannya dengan alasan tidak masuk dan menjadi sukarelawan Bomberos.

5. Pertemuan dengan Bomberos de Santiago

- Delegasi diterima oleh Main Chief Marco dan Mauricio.
- Saat ini apabila terjadi kejadian di kota Santiago, rata-rata dalam waktu 4 menit Bomberos sudah tiba di lokasi kejadian.
- Bomberos mengembangkan sendiri sistem aplikasi untuk menunjang pekerjaannya.
- Misi yang diemban Bomberos merupakan misi kemanusiaan yang tidak boleh disusupi oleh isu seperti politik dan isu-isu strategis lainnya.
- 98% masyarakat Chili menganggap keberadaan Bomberos sangatlah penting, hal ini menjadi motivasi bagi Bomberos untuk lebih baik lagi.
- Terkait pendanaan, 30% dari Pemerintah, 15-20% dari uang hasil sewa asset yang dimiliki Bomberos Santiago, 45-50% dari masyarakat sebagai donasi yang diaudit untuk kemudian dilaporkan kembali kepada masyarakat.
- Dana yang berasal dari masyarakat digunakan sepenuhnya untuk kendaraan, operasional, dan perlengkapan Bomberos, bukan untuk hal lainnya.

G. SIMPULAN

1. ONEMI dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 369 Maret Tahun 1974 yang bertugas melakukan pengawasan dan koordinasi dengan Lembaga dan organisasi teknis lainnya terkait penanggulangan bencana.
2. Salah satu fungsi terpenting ONEMI adalah mengembangkan *Early Warning System* (EWS) bekerjasama dengan CIGIDEN. ONEMI yang berada di daerah sangat bergantung pada ONEMI Nasional, karena semua keputusan diambil di tingkat Nasional.
3. *Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada* (SHOA) merupakan organisasi yang mengawasi tentang tsunami, *Corporación Nacional Forestal* (CONAF) yang mengawasi kebakaran hutan dan berada dibawah Kementerian Pertanian.
4. 2% dari APBN digunakan untuk dana penanggulangan bencana.
5. CIGIDEN diberikan alokasi dana USD 2juta/tahun oleh Pemerintah. Salah satu yang dilakukan adalah penelitian mengenai strategi mitigasi yang efisien.

6. Untuk Early Warning System (EWS) dikontrol oleh Angkatan Laut dengan bantuan CIGIDEN khususnya untuk penelitian dan pengembangan. EWS yang ada terus diperbarui agar akibat bencana dapat diminimalisir.
7. Terkait pendanaan Bomberos daerah mendapatkan 30% dari Pemerintah, 15-20% dari uang hasil sewa sset yang dimiliki Bomberos Santiago, 45-50% dari masyarakat sebagai donasi yang diaudit untuk kemudian dilaporkan kembali kepada masyarakat.

H. SARAN

1. Penanggulangan bencana harus diatur dengan komprehensif dan jelas, agar mudah dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh pihak-pihak terkait.
2. Koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam penanggulangan bencana sebaiknya dilakukan oleh satu pihak agar penanggulangan bencana dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
3. Tugas pokok dan fungsi pihak-pihak yang terkait penanggulangan bencana harus diatur dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih antara pihak yang satu dan lainnya.
4. Pola dan strategi penanggulangan bencana harus dipetakan dan dibuat secara komprehensif.
5. Penelitian dan pengembangan dalam penanggulangan bencana, baik mitigasi bencana hingga sistem peringatan dini, perlu ditingkatkan untuk mengurangi risiko bencana.
6. Pendanaan Kebencanaan bukan lagi merupakan isu lokal atau nasional, tetapi juga sudah melibatkan internasional, sehingga perlu diatur secara jelas terkait hal tersebut.
7. Anggaran mitigasi bencana perlu ditingkatkan, karena pencegahan sangat penting untuk mengurangi risiko suatu bencana. Kelebihan anggaran tersebut salah satunya dapat dialokasikan untuk edukasi terhadap masyarakat agar lebih mawas terhadap bencana.

I. PENUTUP

Demikian Laporan Diplomasi Parlemen Badan Legislasi DPR RI ke Chili dalam rangka Penyusunan RUU tentang Penanggulangan Bencana. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan untuk menyempurnakan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

JAKARTA, FEBRUARI 2019

DELEGASI DIPLOMASI PARLEMEN BADAN LEGISLASI DPR RI

KETUA DELEGASI,

ttd

DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH

A-489

LAMPIRAN FOTO



Pertemuan Delegasi dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Chili dan Staf



Penyerahan cenderamata oleh Ketua Delegasi kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Chili



Delegasi berfoto di depan kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Chili



Pertemuan Delegasi dengan La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI)



Kunjungan ke ruang kontrol peringatan dini bencana di ONEMI



Penyerahan cenderamata oleh Ketua Delegasi kepada Direktur Nasional ONEMI



Delegasi berfoto di depan kantor ONEMI



Pertemuan Delegasi dengan Centro de Investigacion para la Gestion Integrada del Riesgo de Desastres Naturales/CIGIDEN (National Research Center for Integrated Disaster Risk Management)



Penyerahan cenderamata oleh Ketua Delegasi kepada Direktur CIGIDEN



Delegasi berfoto di depan kantor CIGIDEN



Perwakilan BOMBEROS Chili sedang mempresentasikan lembaganya



Pertemuan Delegasi dengan BOMBEROS Chili



Penyerahan cenderamata oleh Ketua Delegasi kepada perwakilan BOMBEROS
Chili



Pertemuan dengan BOMBEROS Santiago



Delegasi saat pertemuan dengan BOMBEROS Santiago



Delegasi berfoto di ruang rapat khusus BOMBEROS Santiago